

### **BAB III**

## **EFEKTIVITAS E-WARONG KUBE JASA PKH SEJAHTERA WIROBRAJAN DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pada bab III ini akan menjelaskan mengenai pembahasan Efektivitas e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dalam mengoptimalkan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Yogyakarta Tahun 2017. Dalam pembahasan ini, terdapat penjelasan terkait analisis efektivitas e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dan hubungan kerjasama antar stakeholder dalam mendukung pengelolaan e-Warong. Hasil analisis tersebut, akan dijelaskan secara jelas dan akurat sesuai dengan temuan dilapangan.

#### **A. Efektivitas e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan**

Efektivitas adalah pencapaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu dan lain sebagainya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan output atau hasil dari pelaksanaan dari suatu kegiatan dan sekaligus menjadi suatu tolak ukur keberhasilan dari suatu kegiatan. Indikator yang digunakan, untuk mengukur efektivitas pengelolaan e-Warong yaitu, sebagai berikut :

## 1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan suatu upaya yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak stakeholder terkait, untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Dalam pengelolaan e-Warong, pemahaman program dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara input dan output yang dihasilkan. Masing-masing stakeholder harus memiliki persepsi yang sama dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan, menjelaskan bahwa:

*“Untuk saat ini, masing-masing anggota e-Warong sudah memahami petunjuk pelaksana yang diberikan dan telah berjalan dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari anggota e-Warong yang telah melayani peserta KPM untuk mencairkan dana bantuan sosial non tunai, melalui mesin EDC yang diberikan oleh pihak BNI. Untuk saat ini e-Warong hanya dapat mencairkan dana program BPNT dan untuk program PKH masih belum bisa dicarikan di e-Warong, karena adanya penarikan biaya oleh pihak BNI, sehingga kami mengusulkan bagi peserta KPM untuk mengambil di ATM atau bank terdekat”. (Hasil wawancara tanggal 15 November 2017)*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa masing-masing anggota e-Warong di Kelurahan Pakuncen telah memahami tugas dan fungsinya untuk melayani pencairan bantuan sosial secara non tunai. Dalam pencairan bantuan program BPNT, telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Untuk mendukung proses pengelolaan, maka telah dibentuk pendamping sosial untuk setiap e-Warong,

yang berfungsi memberikan arahan sekaligus mengawasi pelaksanaan kegiatan di e-Warong tersebut.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara bersama staff Bagian Penyuluh Sosial, mengatakan bahwa:

*“Dari pihak pemerintah, khususnya Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi dari tingkat pusat hingga daerah dan dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait. Sosialisasi yang diberikan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, dalam penerapannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena dirasakan pihak bank seperti memperlambat dalam memenuhi fasilitas-fasilitas e-Warong dan bahan pangan yang disuplay dari pihak bulog cenderung buruk/jelek. Oleh karena itu, kami menghimbau agar e-Warong beralih mensuplay bahan pangan milik swasta/koperasi yang telah bekerjasama dengan pemerintah. kemudian, untuk Kube Jasa, kami telah memberikan pelatihan berupa workshop, diskusi publik, ceramah dan studi kasus, sehingga memberikan pemahaman kepada kube untuk dapat mengelola e-Warong secara mandiri”. (Hasil wawancara tanggal 16 November 2017)*

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sosialisasi yang diberikan kepada pihak stakeholder belum berjalan dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang telah ditentukan dengan pelaksanaan dilapangan. Masing-masing stakeholder memiliki persepsi yang berbeda-beda khususnya pihak Bank BNI dan Bulog.

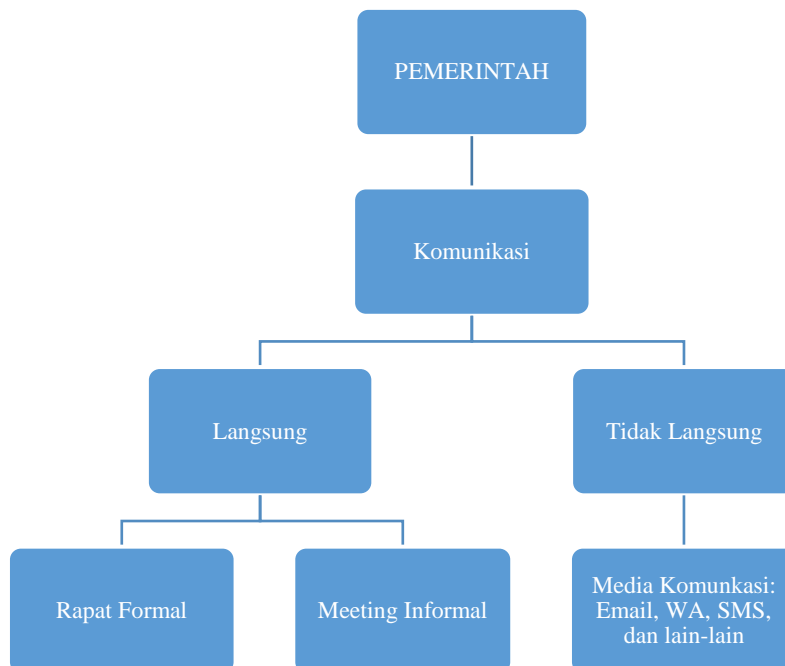
Dalam pengelolaan e-Warong di Kelurahan Wirobrajan masih terdapat kendala-kendala seperti; Mesin EDC yang cenderung error atau tidak tersambung dengan jaringan; Kartu KKS error dan tidak adanya upaya dari Bank BNI untuk mengatur mekanisme pencairan bantuan sosial non tunai. Kendala tersebut dapat terjadi, karena masing-masing stakeholder sudah

terlanjur menikmati margin-margin yang ada di setiap wilayah, sehingga pemenuhan operasional di e-Warong mengalami keterlambatan. Selain itu, beras yang disuplay dari pihak Bulog cenderung memiliki kualitas yang buruk seperti : beras berubah warna, beras berbau dan beras berair, sehingga Dinas Sosial Kota Yogyakarta harus menghentikan kerjasama dan beralih menggunakan beras dari koperasi milik swasta yang memiliki kualitas baik/premium.

Untuk mendukung proses pengelolaan e-Warong, Dinas Sosial telah melakukan berbagai bentuk komunikasi kepada pihak stakeholder, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk lebih jelas mengenai komunikasi tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2**

**Bentuk Komunikasi Antar Stakeholder**



*Sumber: Hasil temuan di lapangan*

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dijelaskan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, terdiri dari 2 (dua) yaitu secara langsung dan tidak langsung. *Pertama*, untuk secara langsung yaitu, melakukan rapat formal beserta para kelompok kepentingan dan meeting informal. *Kedua*, Selanjutnya, untuk komunikasi secara tidak langsung, maka dapat menggunakan via email, telpon, Wa, SMS dan lain sebagainya. Dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, diharapkan pengelolaan e-Warong di Kelurahan Pakuncen dapat berjalan dengan efektif, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, perlu adanya sosialisasi lebih mendalam kepada masing-masing stakeholder, mengenai pentingnya pelaksanaan e-warong untuk mengoptimalkan penerimaan bantuan sosial bagi peserta penerima manfaat.

## **2. Tepat Sasaran**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program, ketepatan sasaran sangatlah diperlukan. Secara umum, sasaran memiliki pengertian yaitu, segala sesuatu yang dicapai dan dihasilkan oleh instansi atau pihak tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sasaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan kegiatan/program, karena memberikan ukuran berhasil atau tidaknya suatu kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Sasaran dari diselenggarakannya e-Warong adalah masyarakat yang telah terdaftar menjadi anggota peserta KPM.

Adapun hasil wawancara bersama anggota pengelola e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan, yaitu:

*“Untuk tercapai atau tidaknya sasaran dari e-Warong ini, dirasakan cukup tercapai, karena tujuan dan sasaran yang diberikan sangat jelas dan masing-masing peserta penerima manfaat juga telah diberikan Kartu KKS, sehingga penyaluran bantuan bisa dilakukan oleh peserta yang memiliki kartu KKS tersebut”. (Hasil wawancara tanggal 15 November 2017)*

Menurut penjelasan dari anggota pengelola e-warong tersebut, sasaran yang telah ditentukan sudah cukup tercapai. Hal ini, karena program BPNT hanya dapat dicairkan bagi peserta yang telah memiliki kartu KKS elektronik. Peserta yang telah mencairkan dana program BPNT akan dicatat dan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam bentuk laporan setiap 2 bulan sekali.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan Staff Bagian Penyuluh Sosial, menjelaskan bahwa:

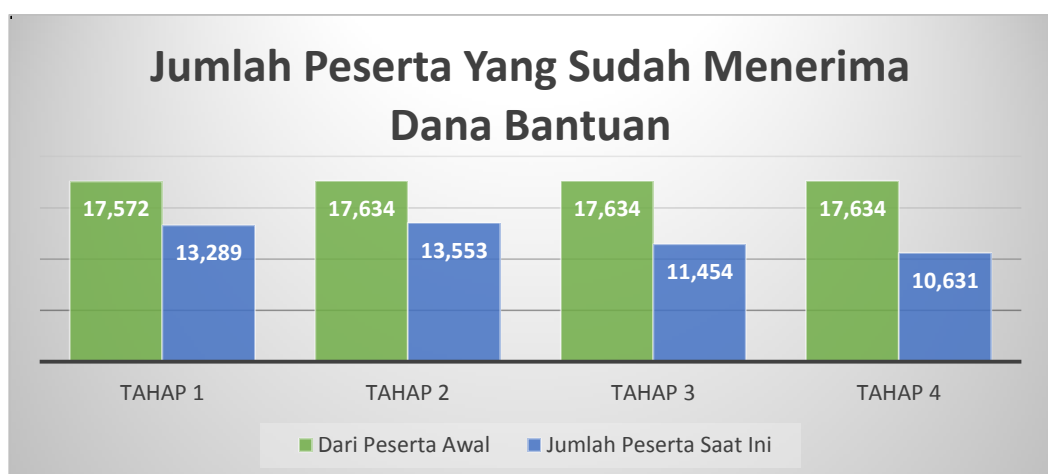
*“Sasaran dari diselenggarakannya e-Warong telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, mengingat bantuan sosial akan disalurkan dalam bentuk kartu KKS yang telah didistribusikan pihak BNI, sesuai dengan data peserta KPM. Kemudian, apabila terdapat penerima manfaat yang termasuk kedalam golongan mampu, maka Dinsos akan memberikan surat keterangan kepada peserta tersebut, untuk dapat mengundurkan diri dari peserta penerima manfaat”. (Hasil wawancara tanggal 16 November 2017)*

Berdasarkan penjelasan tersebut, sasaran dari diselenggarakannya e-Warong, telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, karena kartu yang didistribusikan oleh pihak BNI berdasarkan data yang diberikan pihak Kementerian Sosial. Data tersebut berisikan nama-nama peserta KPM dan bersifat absolut, sehingga akan terus diperbarui. Masing-masing peserta KPM akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 110.000,,- ribu per-bulan, yang hanya dapat dicairkan dalam bentuk pangan. Kemudian, jumlah peserta penerima manfaat yang telah ditentukan dari tahap I sebanyak, 17.572 peserta dan mengalami kenaikan sampai tahap IV, yaitu sebanyak 17.634 peserta. Jumlah ini, akan terus mengalami perubahan, mengikuti temuan-temuan yang ada di lapangan.

Untuk lebih jelas terkait jumlah peserta yang telah ditetapkan sebagai penerima dana program BPNT, maka dapat dilihat pada diagram berikut ini :

**Diagram 1**

**Jumlah Peserta Penerima Dana Bantuan Program BPNT**



*Sumber : Instrumen Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai, Tahun 2017.*

Dari diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta yang telah menerima bantuan program BPNT dari tahap 1 hingga tahap 4 mengalami penurunan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Persentase Peserta BPNT.**

No.	Tahapan BPNT	Jumlah Peserta Awal	Jumlah Peserta Saat Ini	Persentase
1.	Tahap I	17.572 Peserta	13.289 Peserta	76%
2.	Tahap II	17.634 Peserta	13.553 Peserta	77%
3.	Tahap III	17.634 Peserta	11.454 Peserta	65%
4.	Tahap IV	17.634 Peserta	10.631 Peserta	60%

*Sumber : Instrumen Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai, Tahun 2017.*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa penjelasan dari masing-masing tahap dalam penyaluran program BPNT yakni sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, penyaluran program BPNT sudah tersalurkan sebanyak 13.289 dari 17.572 atau sebanyak (76%).
- b. Tahap kedua, sudah tersalurkan sebanyak 13.553 dari 17.634 atau sebanyak (77%).
- c. Tahap ketiga, tersalurkan sebanyak 11.454 dari total 17.634 atau sebanyak (65%).
- d. Tahap keempat, tersalurkan sebanyak 10.631 dari 17.634 atau sebesar (60%).



Jadi, pada mulai tahap pertama penyaluran BPNT mengalami penurunan dari 17.572 peserta menjadi 13.289 atau dapat di persenkan menjadi 76%, kemudian hingga pada tahap terakhir jumlah peserta yang menerima BPNT menjadi 10.631 atau dapat dipersenkan 60%. Hal ini, karena terdapat beberapa kendala seperti : peserta KPM meninggal dunia, peserta KPM pindah alamat, KPM tidak hadir dalam undangan, dan adanya Double data, sehingga perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Dari hasil wawancara, beserta data yang telah ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan e-Warong di Kota Yogyakarta dan khususnya di Kelurahan Pakuncen, telah sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Hal ini, karena data-data peserta penerima manfaat diberikan oleh Kementerian Sosial, berdasarkan rekomendasi dari pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Kementerian Sosial dalam pengelolaan e-Warong memiliki fungsi untuk menyetujui atau menetapkan data-data nama peserta KPM dan data tersebut akan diserahkan kepada pihak Bank BNI dan KMIS. Sebagai penyelenggara pemerintah di daerah, Dinas Sosial telah melakukan verifikasi data-data nama peserta KPM dan apabila terdapat peserta yang tergolong mampu, maka Dinas Sosial akan memberikan surat keterangan kepada peserta tersebut, untuk mengundurkan diri dari peserta KPM. Hal ini, bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penerimaan bantuan sosial secara non tunai.

### 3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam pengelolaan e-Warong sangat diperlukan, mengingat bantuan sosial yang diberikan setiap bulan, kepada masing-masing peserta KPM. Pencairan dana di e-Warong dapat dilakukan setiap hari di e-Warong yang telah disediakan. Ketepatan waktu dalam pengelolaan e-Warong sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan sosial harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Masing-masing stakeholder harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam pencairan bantuan sosial, khususnya program BPNT dapat tersalurkan tepat waktu. Peran dari masing-masing stakeholder memiliki keterlibatan dalam pengelolaan e-Warong agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara dengan anggota pengelola e-Warong, mengemukakan bahwa :

*“Pengambilan dana bantuan sosial, di e-Warong itu sendiri belum terlaksana tepat waktu, karena pengambilan dana bantuan program BPNT mengalami keterlambatan. Seperti contohnya, pada saat proses transaksi menggunakan mesin EDC cenderung tidak tersambung dengan jaringan dan kartu KKS yang disalurkan oleh pihak BNI cenderung error, bahkan saldo di kartu KKS tersebut belum terisi, sehingga terjadi keterlambatan pengambilan bantuan sosial”. (Hasil wawancara tanggal 17 November 2017)*

Pencairan bantuan program BPNT, pada dasarnya dapat dicairkan setiap bulan di e-Warong yang telah disediakan. Masing-masing anggota e-Warong akan melayani setiap peserta KPM yang ingin mencairkan dana bantuan tersebut. Untuk 1 hari, e-Warong dapat melayani pencairan bantuan program

BPNT sebanyak 20-30 orang peserta, tergantung dari ketersediaan bahan pangan di e-Warong. Untuk jadwal pencairan bantuan sosial di e-Warong, dilakukan oleh anggota/pengelola secara bergantian /secara sift. Dengan kata lain, pengelola dibagi waktunya untuk bekerja antara pagi dan siang. Untuk jadwal pagi akan dijaga oleh 2 orang anggota dan siang ada 2 anggota, total yang menjaga dalam satu hari terdiri dari 4 orang. Pelayanan pencairan bantuan sosial, dapat dilakukan setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara bersama Staff Bagian Penyuluh Sosial, menjelaskan yaitu sebagai berikut:

*“Pengelolaan e-warong belum berjalan dengan efektif dan efisien, karena masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Hal ini, karena dalam pengelolaan e-Warong masih terdapat beberapa keterlambatan dalam mencairkan dana bantuan BPNT oleh Bank BNI dan beras yang diberikan oleh Bulog cenderung memiliki kualitas beras yang buruk, sehingga harus beralih menggunakan beras koperasi yang memiliki kualitas beras premium”. (Hasil wawancara tanggal 18 November 2017)*

Menurut penjelasan dari pengelola e-Warong dan Staff Bagian Penyuluh Sosial tersebut, pencairan dana bantuan program BPNT di e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut, karena masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki, khususnya dari pihak Bank BNI selaku penyedia teknologi informasi. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2**

**Kendala-kendala dalam pelaksanaan e-Warong**

<b>No.</b>	<b>Masalah / Kendala</b>	<b>Pemecahan Masalah</b>
1.	Mesin EDC tidak segera dipasang di e-Warong Kube Jasa.	Melakukan koordinasi dengan pihak BNI setiap hari.
2.	Mesin EDC cenderung error.	Reset alat secara manual, menunggu beberapa saat agar traffic jaringan normal
3.	Kartu error	Disediakan kartu sementara
4.	Saldo Rp 0 ,-	Diserahkan pada pihak bank BNI untuk melakukan checking dan top up kartu KKS elektronik.
5.	Nama muncul dalam data namun belum punya kartu	Disediakan kartu sementara
6.	Saldo dicek ada, namun ketika akan ditransaksikan menghilang	Diserahkan pada pihak bank BNI untuk melakukan pengembalian saldo yang hilang
7.	Datang sesuai undangan namun stok barang di agen habis	Agen lapor kepada supplier untuk mengisi stock, KPM mengambil di hari beikutnya.
8.	Mutu barang buruk/jelek	Dilaporkan, diberi pengganti oleh supplier

*Sumber : Instrumen Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai, Tahun 2017.*

Dari penjabaran tabel diatas, beserta hasil wawancara dengan pengelola e-warong dan pihak Dinas Sosial, masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-Warong, yaitu mesin EDC, kartu KKS yang cenderung error dan kualitas bahan pangan yang kurang memadai. Permasalahan tersebut menyebabkan, peserta tidak dapat mengambil dana bantuan sosial di e-Warong dengan tepat waktu, sehingga perlu adanya perbaikan mengenai kartu yang didistribusikan oleh Bank BNI. Selain itu, pihak bank tersebut tidak memiliki inisiatif untuk mengatur mekanisme pencairan bantuan sosial.

Kemudian, adanya keterlambatan dalam penyediaan mesin EDC di setiap e-Warong, sehingga proses pencairan dana secara non tunai belum berjalan sesuai dengan tepat waktu. Di Kota Yogyakarta e-Warong yang telah ditetapkan sebanyak 20 e-Warong dengan rincian, yaitu sebanyak 12 e-Warong yang telah berjalan dan 8 e-Warong lainnya belum beroperasi, karena masih terkendala terkait pemenuhan operasional e-Warong. Pemerintah perlu melakukan koordinasi dan sosialisasi lebih mendalam kepada para stakeholder terkait pentingnya e-Warong sebagai sarana penyaluran bantuan sosial tersebut.

#### 4. Tercapainya Tujuan

Tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dan target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. Tercapainya suatu tujuan, dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara input dan output yang dihasilkan. Tujuan dari diselenggarakannya e-Warong adalah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan bantuan sosial secara non tunai, yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta KPM, sekaligus berfungsi untuk memberdayakan masyarakat Kube itu sendiri. Salah satu bantuan sosial yang dapat dicairkan di e-Warong yaitu program BPNT.

Sebagaimana hasil wawancara bersama anggota pengelola e-Warong, yang mengatakan bahwa :

*“Tujuan dari diselenggarakannya e-Warong, sejauh ini yang kami rasakan belum sepenuhnya tercapai, yang dimana dapat dilihat dari adanya keterlambatan pencairan dana bantuan BPNT karena kesalahan-kesalahan teknis dan untuk program PKH belum bisa dicairkan saat ini. Hal tersebut, karena dalam pencairan dana bantuan memiliki tarif/biaya potongan yang cukup besar yaitu sekitar 2,500-3000 ribu. Pihak pengelola tidak mengetahui adanya penarikan tarif/biaya disetiap pengambilan tunai kepada peserta, karena tidak ada koordinasi yang diberikan oleh pihak bank, sehingga peserta lebih memilih pengambilan dana bantuan sosial melalui ATM. Jika pengambilan melalui ATM, maka dana bantuan sosial dapat diambil sepenuhnya. Selain itu, di e-Warong kami juga menjual produk-produk kube untuk menambah penghasilan”. (Hasil wawancara tanggal 17 November 2017)*

Tujuan dari diselenggarakannya e-Warong berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola e-Warong sudah cukup tercapai, karena penyaluran bantuan

program BPNT sudah dapat dicairkan di e-warong, meskipun terdapat keterlambatan terkait mesin EDC dan kartu KKS yang cenderung error, sehingga peserta KPM terkadang harus menunggu pencairan dana program BPNT tersebut.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara bersama Staff Bagian Penyuluh Sosial, menjelaskan bahwa :

*“Pencapaian tujuan dari pengelolaan e-Warong belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, karena masing-masing stakeholder memiliki persepsi yang berbeda dan tidak memiliki pendapat yang sama. Hal tersebut disebabkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Sosial sangat terlambat. Sehingga, pelaksanaan dari e-Warong belum bisa berjalan dengan efektif”. (Hasil wawancara tanggal 18 November 2017)*

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan dari pengelolaan e-Warong, belum tercapai. Hal tersebut, karena adanya perbedaan persepsi antar stakeholder terkait, seperti pihak Bank BNI dan Bulog, sehingga dalam proses pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Permasalahan ini, dikarenakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Kementerian Sosial sangat terlambat, sehingga pada proses pelaksanaan tidak terarah dengan baik. Kemudian, adanya permasalahan-permasalahan teknis terkait mesin EDC dan kartu KKS yang didistribusikan oleh Bank BNI.

Selanjutnya, untuk jumlah penyaluran dana BPNT yang telah dilaksanakan di e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3**

**Jumlah Penyaluran BPNT di e-Warong Kube Jasa Sejahtera, bulan  
November 2017**

No	e-Warong Kube	Kapasitas Layanan (KPM/hari)	Kapasitas Stok (paket)	Supplier	Total Penyaluran
1.	Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan	100 Paket	150	Koperasi Binus	492
2.	Kube Jasa PKH Sejahtera Jetis	100 Paket	200	Koperasi Binus	572
3.	Kube Jasa PKH Sejahtera Gondokusuman	100 Paket	200	Koperasi Binus	407

*Sumber : Hasil temuan di lapangan*

Dari penjelasan tabel diatas, e-Warong Kube Jasa yang memiliki total penyaluran terbanyak terdapat di e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Jetis yaitu sebanyak 572 penyaluran dan disusul dengan e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dengan total jumlah penyaluran sebanyak 492



penyaluran. Kemudian, untuk e-Warong Kube Jasa Sejahtera Gondokusuman mendapat total penyaluran paling kecil, dibandingkan 2 e-Warong tersebut yaitu hanya sebesar 407 penyaluran. Jika dibandingkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemensos yaitu 1 e-Warong mampu melayani 500-1000 peserta KPM, maka target dari e-Warong belum sepenuhnya tercapai, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terkait pengelolaan e-Warong tersebut.

Menurut Bapak Bandoro, selaku Penyuluh Sosial menjelaskan terkait jumlah peserta dan jumlah anggaran di Kota Yogyakarta yaitu :

*“Jumlah peserta penerima BPNT di Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 17.634 peserta dan anggaran yang diberikan oleh Kemensos bersumber dari APBN sebesar Rp. 23.276.880.000 miliar”. (Hasil wawancara tanggal 16 November 2017)*

Jumlah peserta KPM yang menerima dana bantuan program BPNT yaitu sebanyak 17.634 peserta dan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 23.276.880.000 miliar. Jumlah peserta KPM tersebut, akan terus mengalami perubahan, dikarenakan adanya proses verifikasi data peserta KPM yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Untuk jumlah peserta KPM di Kecamatan Wirobrajan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4**

**Jumlah Peserta KPM di Kecamatan Wirorbajan Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan Wirobrajan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kelurahan Pakuncen	630
2.	Kelurahan Patangpuluhan	362
3.	Kelurahan Wirobrajan	458
<b>Total</b>		<b>1.450</b>

*Sumber : Instrumen Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai, Tahun 2017.*

Dari penjelasan tabel diatas, total peserta KPM di Kelurahan Pakuncen sebanyak 630 peserta dan menjadi Kelurahan dengan peserta KPM terbanyak diantara 2 kelurahan lainnya. Dari perbandingan jumlah peserta e-Warong yang berjumlah 630 peserta, dengan total jumlah penyaluran yaitu sebanyak 492, maka belum sepenuhnya mencapai seluruh peserta KPM di Kelurahan Pakuncen. Hal ini, karena masih terdapat 138 peserta yang belum mencairkan dana bantuan sosial tersebut. Dalam pelaksanaanya, masing-masing e-Warong akan diberikan 1 pendamping, yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan mengatur jalannya e-Warong tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara bersama Bapak Bandoro selaku penyuluh sosial, beliau menjelaskan bahwa:

*“Dinas Sosial Kota Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan e-Warong yang dilakukan setiap 2 bulan sekali dalam bentuk laporan. Laporan yang diberikan berisi, Jumlah dana yang disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh peserta KPM, Jumlah dana yang tersisa dan jumlah KPM yang belum menarik bantuan pangan. Untuk pengawasan, dilakukan oleh pendamping Sosial/PKH yang bertugas untuk memberikan masukan dan arahan dalam mengatur proses penyelenggaraan e-Warong tersebut”. (Hasil wawancara tanggal 16 November 2017)*

Di e-Warong menyediakan bahan pangan murah yang disuplay dari distributor baik itu Bulog, maupun Koperasi. Harga yang dijual di e-Warong memiliki harga yang murah dan mudah dijangkau oleh peserta KPM dan masyarakat umum. Dengan adanya e-Warong, diharapkan mampu meningkatkan pendapat bagi Kube, sekaligus sebagai upaya untuk memberdayakan kelompok Kube produksi dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara dan temuan di lapangan, tujuan dari e-Warong belum berjalan dengan baik. Pada proses pengelolaan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu diperbaiki, khususnya dari pihak Bank BNI. Sarana dan prasarana yang diberikan cenderung terlambat dan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Mesin EDC yang seharusnya dapat beroperasi dengan baik, justru mengalami kendala dalam

jaringan yang tidak terkoneksi, bahkan error, sehingga pencairan bantuan oleh peserta KPM menjadi terlambat. Kemudian, kartu KKS yang didistribusikan sebagai alat pencairan bantuan sosial secara non tunai, masih mengalami error dan bahkan saldo di kartu tersebut belum terisi. Hal ini, dapat dilihat bahwa peranan dari pihak Bank BNI tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain itu, kualitas bahan pangan yang diberikan dari pihak Bulog cenderung buruk dan tidak sesuai dan pada akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan bahan pangan milik bulog tersebut. Akan tetapi, pihak bulog cenderung berusaha mencari kekurangan dari sistem yang telah dibentuk oleh Dinas Sosial, agar dapat kembali menggunakan produk bulog. Perlu adanya koordinasi yang dilakukan kepada masing-masing stakeholder dan memberikan himbauan terkait pentingnya pengelolaan e-Warong bagi peserta KPM.

## **5. Perubahan Nyata**

Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau kelompok terkait pelaksanaan kegiatan atau program yang telah dijalankan. Perubahan nyata dapat berdampak positif, maupun berdampak negatif, tergantung dari proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan e-Warong, perubahan nyata yang akan secara langsung dirasakan oleh peserta KPM yang menerima

bantuan sosial tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Surtiharningsih, selaku sekretaris pengelola e-Warong yaitu sebagai berikut :

*“Untuk respon dari peserta penerima manfaat sangat terbantu dengan adanya BPNT ini, karena bantuan yang diberikan selama 1 bulan sekali, dengan hanya membawa kartu KKS dan buku tabungan, peserta bisa mengambil bahan pangan maksimal 10 Kg beras dan 2 Kg gula. Peserta juga dapat memilih bahan pangan yang diinginkan dalam bentuk eceran, sehingga peserta dapat menyesuaikan kebutuhan”. (Hasil wawancara tanggal 17 November 2017)*

Perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta KPM dengan adanya e-warong yaitu memberikan kemudahan bagi peserta untuk dapat mencairkan dana bantuan sosial. Peserta KPM hanya perlu datang membawa Kartu KKS elektronik beserta buku tabungan, maka proses transaksi non tunai dapat dilaksanakan. Sebelum adanya e-warong, peserta KPM khususnya untuk program BPNT, peserta harus mencari lokasi tempat penyediaan pencairan BPNT yang dirasakan sangat sulit. Akan tetapi, dengan adanya e-Warong peserta diberikan kemudahan, karena e-Warong telah tersedia di beberapa tempat di Kota Yogyakarta, sehingga mudah dijangkau oleh peserta KPM. Di e-Warong, telah menyediakan bahan pangan murah seperti beras, tepung terigu, gula dan lain sebagainya dengan harga dibawah pasar. Selain itu, peserta penerima manfaat juga tidak perlu jauh-jauh mencari tempat pembayaran, karena di e-Warong telah menyediakan semua pembayaran perbankan seperti tagihan listrik, air, PDAM, pembayaran pulsa, token listrik

dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas terkait perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya e-Warong yakni, sebagai berikut :

**Tabel 5**

No.	Jenis Perubahan	Sebelum	Sesudah
1.	Bahan Pangan	Melakukan kerjasama dengan pihak Bulog sebagai supplier bahan pangan.	Tidak bekerjasama dengan pihak bulog, karena kualitas bahan pangan seperti beras cenderung, buruk, sehingga beralih menggunakan beras milik koperasi dengan kualitas baik/premium.
2.	Penyaluran bantuan	Penyaluran bantuan berupa bahan pangan murah bagi peserta bantuan sosial.	Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non tunai berupa dana sebesar Rp. 110.000 ribu, bagi peserta, yang nantinya dipergunakan untuk membeli bahan pangan yang telah disediakan.
3.	Tempat penjualan produk Kube	Tidak adanya sarana/ tempat penjualan produk bagi Kube.	Menyediakan sarana bagi Kube untuk menjual produk yang dihasilkan seperti, tas rajut, kain batik dan lain sebagainya.
4.	Pembayaran perbankan	Hanya bisa melakukan transaksi dengan agen yang bekerjasama dengan bank Himbara seperti RPK dan agen46 BNI.	Menambah pilihan dalam pembayaran perbankan, karena di e-Warong menyediakan seluruh keperluan peserta KPM.
5.	Lokasi	Lokasi yang sulit dijangkau oleh peserta KPM, karena tidak strategis.	Lokasi yang mudah dijangkau oleh peserta KPM, karena telah dilakukan survei terhadap lokasi yang akan dijadikan tempat e-Warong.

--	--	--	--

**Perbandingan sebelum dan sesudah diterapkannya e-Warong**

*Sumber : Hasil Temuan di Lapangan*

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta KPM berdampak positif dan memberikan kemudahan kepada peserta KPM untuk mencairkan dana bantuan sosial tersebut. Peserta hanya datang membawa kartu KKS dan Buku Tabungan, maka proses transaksi dapat dilaksanakan. Selain itu, masyarakat khususnya peserta KPM secara tidak langsung diberikan pemahaman terkait penggunaan teknologi informasi, agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemerintah harus terus melakukan perbaikan terkait proses pengelolaan dan pelaksanaan e-Warong, agar dalam penerapannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

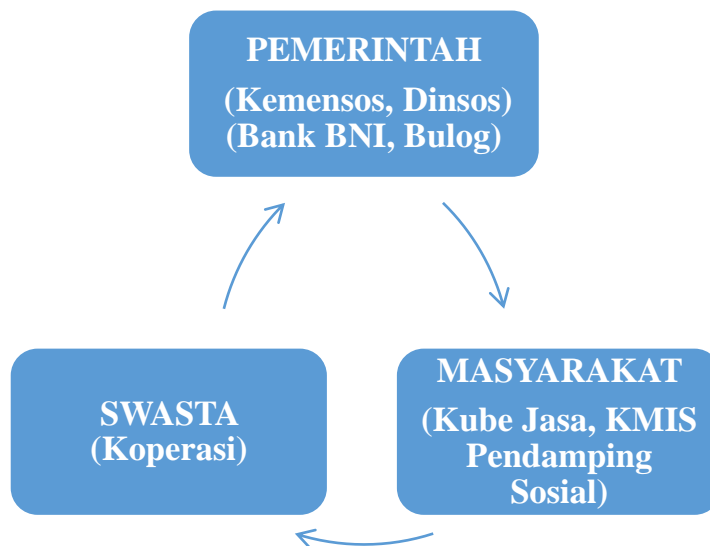
**B. Hubungan Kerjasama Antar Stakeholder dalam pengelolaan e-Warong**

Hubungan Kerjasama dengan pihak stakeholder dalam pelaksanaan suatu kegiatan/program sangat diperlukan, mengingat berperan dalam penggerak dan sebagai penyedia pemenuhan kebutuhan dalam proses pembangunan. Dalam pengelolaan e-Warong pihak stakeholder bertugas sebagai penyedia sarana prasarana dan sekaligus penyedia bahan pangan yang dibutuhkan. Dalam hubungan kerjasama menggunakan konsep 3 pilar Good Governance, keterlibatan

dari masing-masing stakeholder sangatlah diperlukan, untuk mendukung pengelolaan e-Warong menjadi lebih efektif. Dalam pengelolaan e-Warong, pihak stakeholder terdiri dari Himbara (BNI), Bulog/Koperasi, KMIS, Kube Jasa dan Pendamping Sosial. Untuk lebih jelas, terkait konsep 3 Pilar good governance dalam pengelolaan e-Warong dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 3**

**Konsep 3 Pilar Good Governance**



*Sumber: Hasil Analisis Tahun, 2017.*

Dari gambar diatas, maka dapat dijelaskan hubungan dari masing-masing stakeholder yaitu :

**1. Negara/Pemerintah**

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan e-Warong, karena berfungsi untuk membuat kebijakan yang tepat dan akurat, sehingga



dalam pelaksanaan e-Warong dapat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Organisasi perangkat pemerintah dalam pengelolaan e-Warong, yaitu Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta serta Bank Himbara (BNI). Kementerian Sosial disini berfungsi untuk menyediakan petunjuk teknis, menyediakan pendanaan e-warong, menetapkan lokasi peluncuran e-Warong, menyalurkan dana BPSU e-Warong dan mengkoordinasikan kegiatan dengan para stakeholder. Kemudian, untuk Dinas Sosial Kota Yogyakarta berfungsi untuk menyiapkan dan memverifikasi calon lokasi e-Warong, data-data anggota e-Warong, mengusulkan kepada Kementerian Sosial, mengkoordinasikan dan memantau jalannya e-Warong serta memberikan pembinaan kepada masing-masing stakeholder terkait. Himbara disini memiliki fungsi untuk menyiapkan aplikasi melalui teknologi informasi transaksi keuangan non tunai dan pencetakan kartu elektronik serta melakukan pelatihan kepada anggota Kube.

Untuk penyedia bahan pangan pokok (terutama beras) di e-Warong, maka disuplay dari pihak Bulog. Akan tetapi, beras yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, karena beras yang diberikan tidak layak untuk dikonsumsi/kualitas buruk. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Yogyakarta telah berhenti mensuplay beras dari pihak Bulog dan beralih untuk mensuplay beras dari Koperasi milik swasta yang memiliki kualitas baik/premium.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bagian Penyuluh Sosial, menjelaskan bahwa :

*“Dinas Sosial telah melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Bank BNI, Koperasi milik swasta dan masyarakat. Hubungan kerjasama ini, lebih bersifat koordinasi dan mengarahkan pihak tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak Dinsos. BNI dalam hal ini berfungsi sebagai penyedia sarana prasarana di e-Warong dan Koperasi berfungsi sebagai penyedia bahan pangan. Untuk masyarakat kami telah membentuk Kube yang telah kami usulkan kepada Kemensos dan telah disetujui. Kami membentuk Kube untuk dapat memberdayakan masyarakat itu sendiri dan sekaligus sebagai pelaksanaan e-Warong yang kami bentuk, sehingga pengelolaan e-warong dapat berjalan dengan baik”. (Hasil wawancara tanggal 20 November 2017)*

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan kepada masing-masing stakeholder, bersifat koordinasi. Untuk mendukung pengelolaan e-Warong, Dinas Sosial telah melakukan komunikasi dengan pihak stakholder seperti, rapat formal, meeting informal dan menggunakan media komunikasi pendukung lainnya. Untuk mengetahui hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, dengan pihak swasta, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi terkait supplier bahan pangan yang akan display.
- b. Memberikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam proses pengelolaan e-Warong.
- c. Memberikan himbuan terkait kualitas bahan pangan yang akan display.

Koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada swasta sangat penting, mengingat swasta berfungsi sebagai pelaku utama dalam penggerak kegiatan di e-Warong. Selanjutnya, untuk hubungan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membentuk anggota Kube Jasa sebagai pengelola e-Warong yang terdiri dari peserta penerima manfaat.
- b. Memberikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana.
- c. Memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi informasi dalam pencairan bantuan sosial non tunai.
- d. Memberikan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada pengelola e-Warong.

Dalam pengelolaan e-Warong, masyarakat berfungsi sebagai pelaku utama yang dituntut untuk dapat mengelola e-Warong secara mandiri dan aktif, sehingga mampu mengembangkan pola pikir masyarakat serta menambah wawasan dalam dunia usaha. Kendala dari masyarakat yang sering ditemukan dalam pengelolaan e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera adalah tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Bank BNI untuk mengatur mekanisme pencairan bantuan sosial tersebut. Seperti halnya, bantuan sosial program PKH yang sampai saat ini belum bisa dicairkan di e-Warong, karena adanya penarikan dana yang dilakukan oleh pihak Bank BNI. Untuk hubungan kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan Bank BNI yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Membuka tabungan dan membuat kartu KKS sesuai dengan data yang diberikan Kementerian Sosial.
- b. Mendistribusikan kartu KKS kepada masing-masing peserta KPM.
- c. Menyalurkan dana bantuan program BPNT ke rekening peserta KPM.

d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung e-Warong.

Hubungan kerjasama dengan pihak BNI selaku penyedia sarana dan prasarana dirasakan cukup baik, meskipun masih terjadinya beberapa kendala yang disebabkan sarana dan prasarana yang diberikan cenderung error. Pihak BNI harus melakukan perbaikan, terkait sarana dan prasarana yang diberikan, karena berfungsi sebagai penunjang dalam penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

Selain itu, berdasarkan hubungan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan kerjasama antar stakeholder bersifat koordinasi. Hal ini, dapat dilihat dari adanya Koordinasi yang dilakukan dari pihak pemerintah kepada pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan e-Warong tersebut. Pemerintah bertugas memberikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana kepada masing-masing pihak terkait, agar proses pelaksanaan e-Warong dapat berjalan optimal. Pemerintah juga memberikan arahan, mekanisme dan tata cara yang dilakukan dalam pengelolaan e-Warong agar lebih efektif. Dari adanya hubungan kerjasama tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pencairan bantuan sosial di e-Warong.

## **2. Sektor Swasta**

Dalam pengelolaan e-Warong, pihak swasta sangatlah diperlukan, karena berfungsi sebagai supplier bahan pangan murah (terutama beras) di e-Warong

dengan kualitas baik/premium. Hal ini, karena e-Warong telah beralih mensuplay bahan pangan (terutama beras) dari Bulog ke Koperasi. Selanjutnya, koperasi yang telah bekerjasama dengan e-Warong adalah Koperasi Binus, Koperasi UD Mas Poer dan Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Untuk e-Warong di Kelurahan Pakuncen, telah mensuplay bahan pangan (terutama beras) dari Koperasi Binus, yang dirasakan memiliki kualitas baik/premium. Di e-Warong, selain menyediakan penyaluran program BPNT, juga menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti halnya warung kelontong pada umumnya. Persediaan bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya di e-Warong juga disuplay dari pihak-pihak swasta, sehingga mampu mengoptimalkan pengelolaan e-Warong tersebut.

Kemudian, untuk hubungan kerjasama pihak Swasta dengan masyarakat yaitu dapat dijelaskan berikut ini :

- a. Melakukan koordinasi terkait jenis-jenis bahan pangan yang akan disuplay.
- b. Melakukan koordinasi terkait harga bahan pangan yang akan disuplay.
- c. Menyediakan bahan pangan dengan kualitas baik/premium.
- d. Mendistribusikan bahan pangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dari hubungan kerjasama antara pihak swasta dengan masyarakat dapat dijelaskan bahwa hubungan kerjasama sudah berjalan dengan baik dan sesuai

dengan petunjuk yang telah ditentukan. Hal tersebut, dapat dilihat dari adanya hubungan kerjasama yang dilakukan antara pihak swasta dan masyarakat mulai dari menentukan jenis bahan pangan yang akan disuplay, menentukan harga yang akan dipasarkan di e-Warong, melakukan pendistribusian bahan pangan sesuai dengan kebutuhan e-Warong, menyediakan bahan pangan yang berkualitas, sehingga kebutuhan bahan pangan di e-Warong dapat terpenuhi.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola e-Warong, beliau menjelaskan bahwa:

*“Untuk memenuhi kebutuhan di e-Warong dan sekaligus menyediakan bahan pangan, kami melakukan pemesanan di koperasi. Kami melakukan kerjasama dengan koperasi tersebut, karena kualitas bahan pangan yang diberikan premium. Kemudian, kami juga memesan beberapa barang pendukung lain seperti warung kelontong pada umumnya, sehingga masyarakat umum dapat berbelanja disini juga”.*  
(Hasil wawancara tanggal 17 November 2017)

Di e-Warong, masyarakat umum juga dapat melakukan transaksi di e-Warong seperti membeli bahan-bahan keperluan pokok dan pembayaran perbankan lainnya. Hal ini, bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat umum dalam melakukan pembayaran tagihan tepat waktu. Hubungan kerjasama dengan pihak koperasi sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari adanya hubungan kerjasama tersebut, diharapkan pengelolaan e-Warong dapat berjalan dengan efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### 3. Masyarakat

Masyarakat dalam pengelolaan e-Warong terdiri dari Kube Jasa, KMIS, dan pendamping sosial. Kube Jasa disini merupakan peserta penerima manfaat yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan di e-Warong. Kemudian, KMIS bertugas untuk mengatur transaksi bahan pangan yang akan display dari pihak distributor/koperasi. Kemudian, pihak Pendamping Sosial terdiri dari 2 (dua), yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan Pendamping PKH yang berfungsi untuk mengatur serta memberikan arahan kepada Kube Jasa mengenai pelaksanaan e-Warong dengan baik dan benar.

Berdasarkan wawancara dengan anggota pengelola e-warong, dijelaskan bahwa :

*“Dalam bekerjasama dengan pihak bank khususnya BNI, kami sebagai pengelola e-warong akan menjadi agen<sup>46</sup> BNI yang mampu menyediakan pembayaran perbankan, seperti tagihan listrik, air, pulsa hp, BPJS dan sebagainya, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari tempat pembayaran lain, karena di e-Warong, kami sudah bisa melayani”. (Hasil wawancara tanggal 17 November 2017).*

Untuk dapat menyediakan pembayaran perbankan, maka masyarakat khususnya Kube Jasa bekerjasama dengan Bank BNI untuk menjadi agen<sup>46</sup> BNI. Agen<sup>46</sup> BNI adalah mitra BNI (perorangan atau badan hukum yang telah bekerjasama dengan pihak Bank BNI) untuk menyediakan layanan-layanan perbankan tanpa kantor kepada masyarakat atau dikenal sebagai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (layanan laku

pandai). Persyaratan untuk menjadi agen<sup>46</sup> BNI yaitu, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi seluruh persyaratan yang diberikan.

Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka Bank BNI akan melakukan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjadi agen<sup>46</sup> tersebut. Keterlibatan dari masyarakat dalam pengelolaan e-Warong, sangatlah diperlukan, mengingat seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini, dapat dilihat mulai dari:

- a. Melaksanakan proses transaksi non-tunai
- b. Melakukan pemesanan bahan pangan
- c. Menyediakan jenis pembayaran perbankan
- d. Membuat laporan dari hasil pengelolaan e-Warong dan lain sebagainya.

Kelompok Kube Produksi juga dapat memasarkan dagangannya di e-Warong, karena diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bagi Kube, sekaligus memberdayakan kelompok Kube itu sendiri. Dalam meningkatkan penyelenggaraan e-Warong, maka pihak pengelola bekerjasama dengan berbagai stakeholder, sehingga proses pengelolaan dapat berjalan lebih efektif. Pihak stakeholder tersebut yaitu Bank BNI, Distributor/Koperasi, KMIS, Kube Jasa dan Pendamping Sosial. Berdasarkan wawancara bersama anggota pengelola e-Warong, yang mengatakan bahwa :



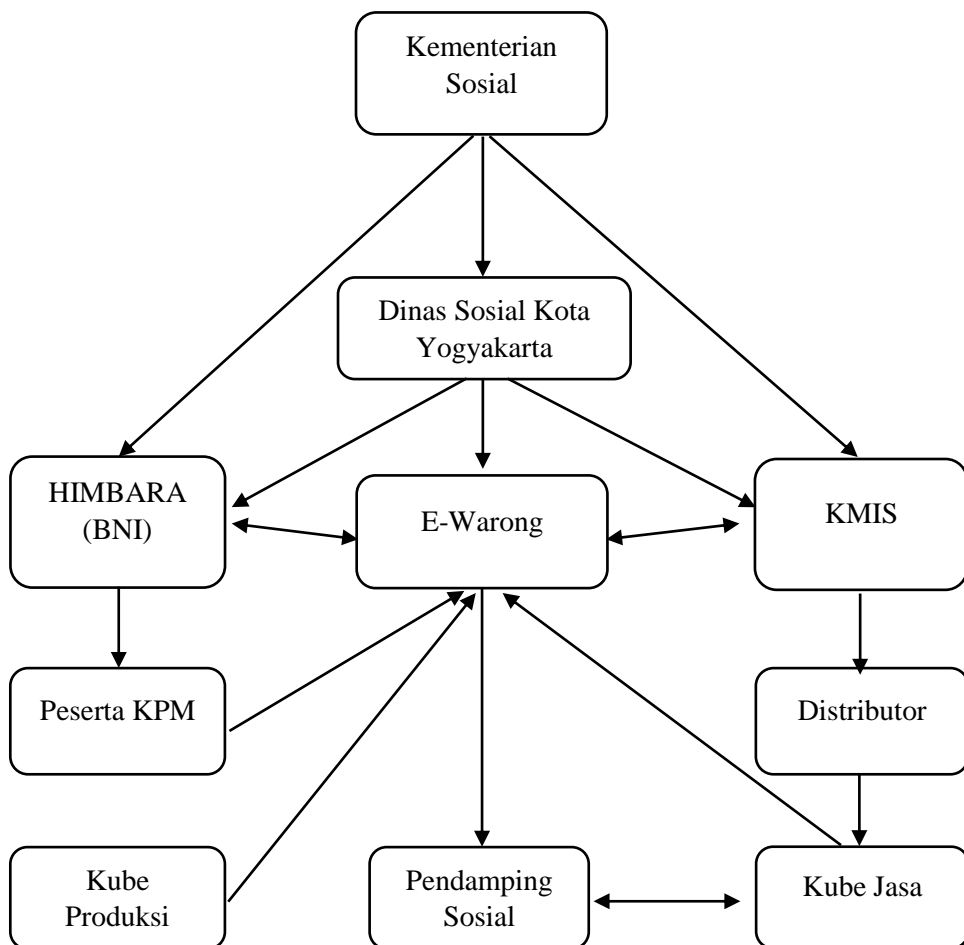
*“Di e-warong sudah tidak melakukan kerjasama dengan Bulog, kami hanya bekerjasama dengan koperasi, karena selama ini bekerjasama dengan bulog sangat mengecewakan seperti contohnya, beras yang diberikan tidak sesuai dengan harapan dan memiliki kualitas yang rendah/buruk, sehingga tidak laku untuk dipasarkan. Untuk e-Warong ini menggunakan beras dari koperasi/penggilingan yang memiliki kualitas yang lebih baik/kualitas premium”. (Hasil wawancara tanggal 17 November 2017)*

Di e-Warong, penyuplay bahan pangan dilakukan oleh pihak koperasi, dimana beras yang dihasilkan berkualitas premium, sesuai dengan harapan yang diinginkan. Salah satu koperasi yang telah bekerjasama dengan e-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan adalah Koperasi Binus. Untuk hubungan kerjasama dengan pihak terkait, sudah berjalan dengan baik, yang dimana dapat dilihat dari pencairan dana bantuan sosial, menyediakan bahan pangan murah, menyediakan pembayaran perbankan dan sebagai tempat penjualan produk Kube. Masyarakat dalam pengelolaan e-warong khususnya, Kube Jasa harus memberikan laporan kepada pihak Dinas Sosial, terkait temuan-temuan dan hambatan yang dialami dalam pengelolaan e-Warong, sehingga Dinas Sosial dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan dari e-Warong tersebut.

Selanjutnya, untuk pola hubungan kerjasama yang dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya program BPNT dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:

**Gambar 4**

**Pola Hubungan Kerjasama Antar Stakeholder**



*Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2017.*

Dari bagan diatas, maka dapat disimpulkan proses hubungan kerjasama pengelolaan e-Warong yaitu :

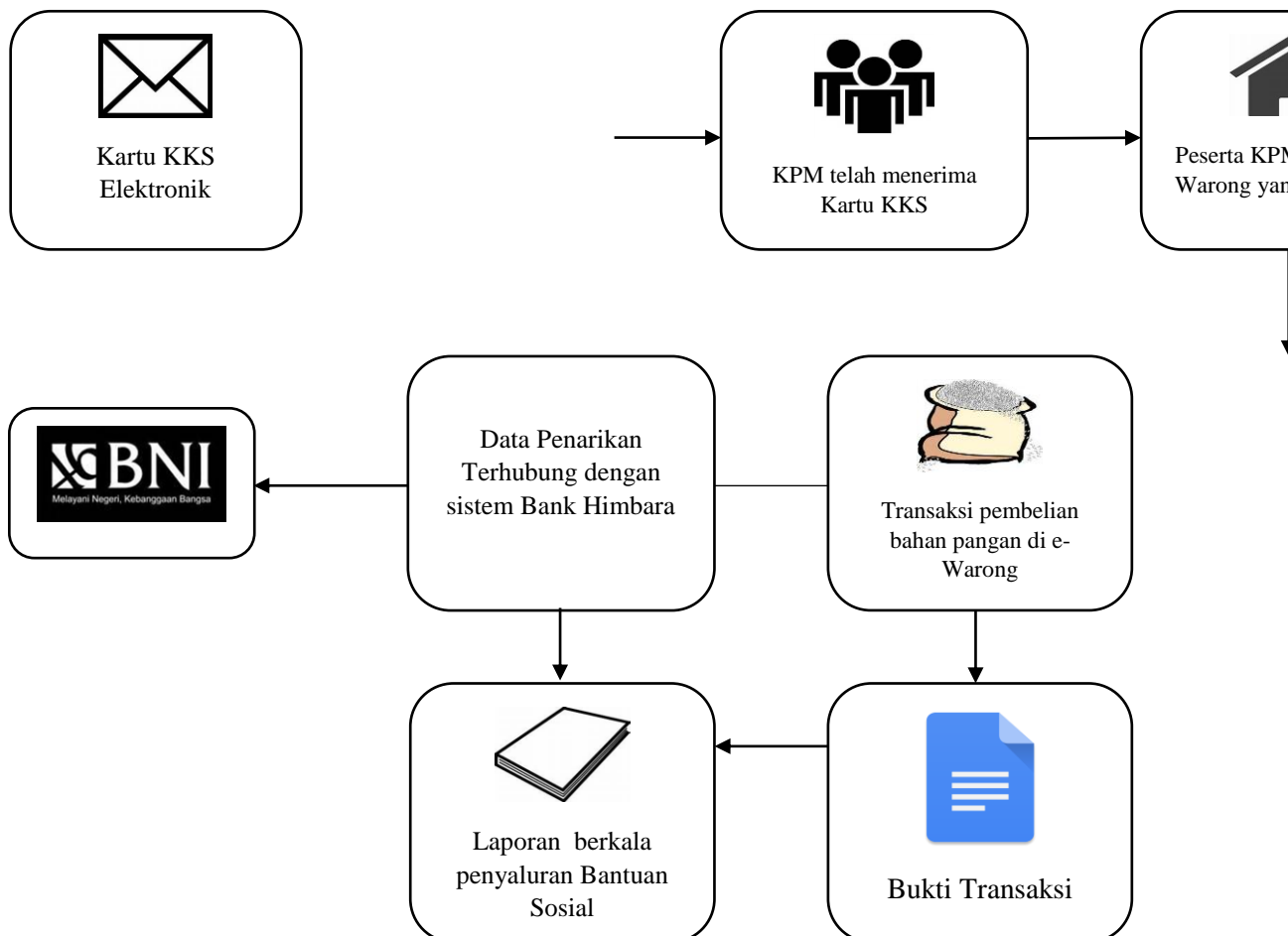
- a. Kemensos melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta, mengenai teknis dan pelaksanaan e-Warong, karena Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki wewenang untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan yang ada di daerah.
- b. Kementerian sosial (Kemensos) menyerahkan data penerima program BPNT/PKH kepada Bank BNI dan KMIS.
- c. Data penerima manfaat tersebut, akan diproses oleh Bank BNI untuk membuka rekening, membuat kartu KKS elektronik beserta buku tabungan dan selanjutnya akan mendistribusikan kepada peserta penerima manfaat.
- d. Kemensos akan mentransfer dana bantuan sosial kepada Bank BNI dan bank tersebut akan menyalurkan dana bantuan sosial ke rekening masing-masing peserta penerima manfaat.
- e. Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) melakukan pemesanan bahan pangan yang dibutuhkan kepada distributor (Bulog/Koperasi) yang memiliki produk bahan pangan sejenis dan sekaligus melakukan pembayaran bahan pangan tersebut.
- f. Pihak Bulog/Koperasi mendistribusikan pesanan bahan pangan kepada masing-masing e-Warong yang telah disediakan.

- g. Pendamping memberikan arahan dan memberikan bimbingan kepada anggota pengelola e-warong.
- h. Peserta yang telah memiliki kartu KKS dapat mencairkan dana bantuan non-tunai di e-Warong dan membeli bahan pangan yang dibutuhkan. Selain itu, e-Warong juga dapat menjual hasil produk-produk Kube di e-Warong, sehingga mampu meningkatkan pendapatan bagi Kube itu sendiri.

Selanjutnya, dalam melakukan proses transaksi pencairan dana program BPNT di e-warong, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 5**

**Proses Pemanfaatan Dana Bantuan Program BPNT**



*Sumber : Hasil temuan  
di lapangan*

Dari Gambar 5 diatas, maka dapat dijelaskan proses transaksi dalam pencairan dana program BPNT yaitu sebagai berikut :

- a. Kartu KKS elektronik didistribusikan kepada masing-masing peserta KPM.
- b. Peserta KPM telah memiliki Kartu KKS elektronik sebagai syarat dalam proses transaksi non tunai.
- c. Peserta KPM dapat memilih e-Warong atau agen yang telah bekerjasama dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) untuk mencairkan dana bantuan sosial tersebut.
- d. Peserta melakukan pemilihan bahan pangan dan melakukan transaksi secara non tunai, menggunakan kartu KKS beserta buku tabungan. kemudian, data dari transaksi tersebut akan secara otomatis terhubung dengan sistem bank, sebagai laporan.
- e. Selanjutnya, pengelola e-Warong menyerahkan bukti transaksi pembelian kepada peserta penerima manfaat beserta kartu KKS dan buku tabungan.
- f. Pengelola e-Warong melakukan perekapan data sebagai laporan berkala yang nantinya akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Kesimpulan keseluruhan terkait hubungan kerjasama antara Dinas Sosial dan pihak berkepentingan seperti Bank BNI, Koperasi dan Kube Jasa, telah berjalan dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari adanya rapat bersama yang dilakukan untuk membahas pengelolaan e-warong agar lebih berjalan dengan optimal. Hubungan kerjasama antara Dinsos dan Bank BNI, hanya sebatas memberikan data jumlah peserta KPM, kemudian menyerahkan anggaran bantuan sosial kepada BNI. Selanjutnya pihak BNI akan membuka tabungan dan membuat kartu KKS elektronik beserta Buku tabungan, dan terakhir membagikan kartu tersebut kepada masing-masing peserta penerima manfaat. Selain itu, pihak bank juga memberikan fasilitas kepada Kube Jasa untuk mendukung penyelenggaraan e-Warong, berupa mesin EDC, untuk mengetahui nominal keluar masuk uang Banos tersebut dan data tersebut akan masuk kedalam BNI sebagai bentuk laporan jumlah dana yang telah dicairkan oleh masing-masing peserta.

Pada awalnya, Dinas Sosial telah bekerjasama dengan bulog, untuk dapat mensuplay bahan pangan beras kepada masing-masing e-warong. Akan tetapi, untuk saat ini, Dinas Sosial sudah tidak lagi bekerjasama dengan Bulog, karena kualitas beras yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, sehingga masing-masing e-Warong mensuplay beras dari koperasi yang memiliki kualitas beras premium/baik. Untuk hubungan kerjasama dengan Kube Jasa, sudah dilaksanakan dengan lancar, transparan dan konstruktif, sehingga untuk hubungan kerjasama dengan pengelola Kube Jasa sudah berjalan dengan baik.